

Pengaruh Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Barat

Celly Andika Devy¹, Risqi Noor Hidayati Putri²

^{1,2} Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: celly.22193@mhs.unesa.ac.id¹, Email : risqiputri@unesa.ac.id²

Article History:

Received: 09 Januari 2026

Revised: 26 Januari 2026

Accepted: 08 Maret 2026

Keywords: Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Pengangguran.

Abstract: Pengangguran masih menjadi permasalahan pembangunan di Provinsi Jawa Barat meskipun kinerja ekonomi daerah menunjukkan perkembangan. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya peran keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan upah dalam mengendalikan pengangguran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara empiris pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat kurun waktu 2019-2024. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan memanfaatkan data panel dari 27 kabupaten/kota. Data yang digunakan merupakan data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum memiliki pengaruh dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, baik secara individual maupun secara bersamaan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kebijakan upah minimum yang tepat memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat pengangguran.

PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan, terutama tingkat pengangguran yang tinggi, masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pengangguran tidak hanya menunjukkan ketidaksuaian antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga mengindikasikan bahwa belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan ketimpangan sosial apabila tidak ditangani secara tepat (Wijayanto & Ode, 2019). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan pengangguran cukup kompleks. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat pada tahun 2024 tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 6,75 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 5 persen.

Tingginya TPT tersebut terjadi meskipun Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 50,35 juta jiwa serta memiliki kontribusi basis industri yang kuat, yang secara potensial seharusnya Jawa Barat mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Namun, faktanya tingkat pengangguran di provinsi tersebut masih melebihi rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan kemampuan penciptaan lapangan kerja, terutama pada periode 2019-2024 yang ditandai oleh fluktuasi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu, Jawa Barat dipilih sebagai objek penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingginya tingkat pengangguran terbuka (Yusuf, 2024).

Dalam konteks ekonomi daerah, tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terlihat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menunjukkan sejauh mana daerah mampu melakukan pembiayaan pembangunan dan kegiatan belanja publik secara mandiri. Secara teoritis, peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah memperluas belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran (Yeimo & Ayuningsasi, 2022). Namun, peningkatan PAD dalam menurunkan pengangguran sangat bergantung pada kualitas alokasi belanja daerah, sehingga peningkatan PAD tidak serta-merta diikuti oleh penurunan pengangguran apabila penggunaannya tidak diarahkan pada sektor produktif dan padat karya (Ali & Ningsih, 2021).

Selain faktor fiskal, pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan aktivitas produksi dan permintaan agregat yang secara teoritis akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Hukum Okun menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran (Alrahman, Susetyo, Taufiq, & Azwardi, 2022). Sejumlah penelitian empiris mendukung hubungan yang bertolak belakang antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, terutama ketika pertumbuhan terjadi pada sektor padat karya (Diniyah & Fisabilillah, 2022). Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menurunkan pengangguran apabila lebih didominasi oleh sektor padat modal (Rizki, Daeng, & Singandaru, 2025). Faktor lain yang turut mempengaruhi pengangguran adalah kebijakan upah minimum. Dalam perspektif teori Keynesian, upah memiliki peran ganda sebagai biaya produksi bagi perusahaan dan sebagai sumber daya beli masyarakat. Kenaikan upah berpotensi memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong kenaikan permintaan agregat, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan tingkat produksi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, jika kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, hal tersebut justru bisa menghambat pertumbuhan usaha dan justru memperparah masalah pengangguran (Marliana, 2022).

Berbagai studi yang pernah dilakukan terdapat variasi hasil berbeda mengenai dampak PAD, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap pengangguran, yang tergantung pada karakteristik wilayah dan periode penelitian. Selain itu, kebaruan studi yang menganalisis ketiga variabel tersebut secara bersamaan pada level kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih terbatas, khususnya rentang waktu 2019-2024 yang mencakup fase sebelum pandemi, masa pandemi, dan masa pemulihan ekonomi menunjukkan adanya kebaruan dalam kajian ini. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis empiris agar dapat memahami pengaruh Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan studi ekonomi daerah bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan fiskal, ekonomi, dan ketenagakerjaan sehingga dapat menurunkan tingkat

pengangguran secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

a. Teori Keynesian

Pemikiran Keynes (1936) yang diperkenalkan dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* menjelaskan bahwa pengangguran terjadi akibat rendahnya permintaan agregat terhadap barang dan jasa, yang menyebabkan aktivitas produksi menurun dan perekonomian terhambat bukan karena keterbatasan kapasitas, melainkan lemahnya konsumsi masyarakat. Mekanisme pasar bebas tidak mampu menyelesaikan persoalan ini karena peningkatan tenaga kerja yang disertai penurunan upah justru menekan daya beli dan mengurangi kemampuan produsen dalam menyerap tenaga kerja secara optimal (Fatmawati, Rosidin, & Al-Ra'zie, 2025).

Selain itu, Keynes menekankan bahwa pengangguran bersifat involuntary unemployment, yaitu kondisi ketika individu bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku tetapi tetap tidak memperoleh pekerjaan karena permintaan agregat yang tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Oleh sebab itu, Keynes menekankan perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah, subsidi sektor produktif, dan pembangunan infrastruktur, untuk mendorong permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga permintaan agregat untuk mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, termasuk melalui sektor pariwisata, guna menjaga pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran (Irnando, Zulaikah, & Satriawan, 2025).

Selain menjelaskan penyebab terjadinya pengangguran, Keynes juga menekankan bahwa upah memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam pembentukan permintaan agregat. Dalam kerangka teori Keynesian, upah tidak hanya dipandang sebagai biaya produksi bagi perusahaan, tetapi juga merupakan sumber pendapatan utama bagi rumah tangga yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Keynes (1936), peningkatan upah akan memperkuat daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong konsumsi serta memperluas permintaan agregat. Kondisi ini menstimulasi perusahaan untuk menambah produksi dan memperluas kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya menurunkan pengangguran.

Keynes juga menekankan bahwa perubahan upah memiliki implikasi makro ekonomi melalui konsep *effective demand* atau permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan total permintaan agregat yang dianggap perusahaan sebagai dasar perencanaan produksi. Dengan demikian, upah yang lebih tinggi dapat memperkuat permintaan efektif karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan permintaan agregat. Peningkatan konsumsi ini kemudian mendorong perusahaan meningkatkan output, memperkuat arus produksi, dan menjaga stabilitas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Keynes juga mengatakan bahwa upah memiliki sifat kaku ke bawah atau rigid artinya upah tidak dapat diturunkan meskipun kondisi ekonomi sedang melemah. Oleh sebab itu, Keynes menolak pandangan klasik bahwa penurunan upah tidak memperbaiki pasar tenaga kerja. Sebaliknya pemotongan upah akan menekan pendapatan rumah tangga, mengurangi konsumsi dan akhirnya melemahkan permintaan agregat serta peluang penciptaan kesempatan kerja (Oyvatt, Öztunalı, & Elgin, 2020).

b. Teori Fiskal Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang berasal dari potensi ekonomi wilayah setempat, yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Ali & Ningsih, 2021). PAD memainkan peran yang sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan serta program pembangunan daerah. Teori Fiskal Daerah menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Musgrave (1959) dalam Akalbeo, Martinez-Vazquez, & Yedgenov (2022) yang menjelaskan kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang mendukung aktivitas ekonomi, fungsi distribusi menekankan pada pemerataan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi agar pertumbuhan tetap berkelanjutan.

Dalam konteks PAD, ketiga fungsi kebijakan fiskal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak hanya memperkuat posisi fiskal pemerintah daerah, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya, keterbatasan PAD membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan kesempatan kerja dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran (Yeimo & Ayuningsasi, 2022).

c. Teori Hukum Okun

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal penting yang memengaruhi perubahan dinamika pengangguran. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah umumnya mencerminkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan tenaga kerja, sehingga mampu menekan jumlah pengangguran. Dengan demikian, terdapat hubungan yang berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi biasanya mengurangi angka pengangguran, sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan tingkat pengangguran. Pandangan ini sejalan dengan Teori Hukum Okun (*Okun's Law*) yang dikemukakan oleh Arthur M. Okun (1962) dalam Rafli, Nurhafiyansa, Syafa, & Aisyah (2024) menyatakan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pengangguran yang terus menurun. Selain itu, ketika pertumbuhan ekonomi melebihi output potensial, perusahaan meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran cenderung menurun. Okun mengembangkan dua pendekatan yaitu *Okun Gap Version* yang menyoroti pengaruh selisih antara output aktual dan potensial terhadap pengangguran, serta *Okun Difference Version* yang menjelaskan bahwa perubahan pertumbuhan output dari waktu ke waktu akan diikuti perubahan tertentu pada tingkat pengangguran (Parulian, Simbolon, Wulandari, & Budiasih, 2025).

Hipotesis

- H_1 : Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh pada pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat
- H_2 : Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh dalam pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat
- H_3 : Diduga upah minimum berpengaruh pada pengangguran di kabupaten/kota Provinsi

Jawa Barat

H_4 : Diduga pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara simultan memengaruhi pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat

METODE PENELITIAN

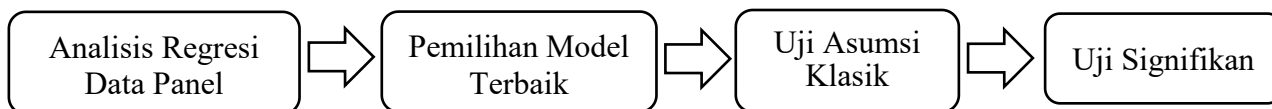
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, bertujuan untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, serta upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Objek penelitian mencakup semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, dengan periode pengamatan dari tahun 2019 hingga 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan variabel independen meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang mengkombinasikan data lintas wilayah dan runtut waktu. Pemilihan model regresi dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model yang paling sesuai. Untuk memastikan validitas hasil estimasi, dilakukan pengujian asumsi klasik serta uji statistik yang meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 \ln UMK_{it} + e_{it}$$

Keterangan

Y	: Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
β_0	: Konstanta
$\beta_{1,2,3}$	: Koefisien
$\ln PAD$	: Logaritma Natural Pendapatan Asli Daerah (rupiah)
PE	: Pertumbuhan Ekonomi (persen)
$\ln UMK$	: Logaritma Natural Upah Minimum (rupiah)
i	: 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat
t	: Tahun 2019-2024
e	: Error terms



Gambar 1. Teknik Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Pemilihan Model Estimasi

Penentuan model regresi data panel dalam penelitian ini didasarkan dengan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 1. Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	19.710979	(26, 132)	0.0000

Sumber : Olahan data melalui output E-Views 12

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan model *Common Effect* (CEM).

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-SQ Statistic</i>	<i>Chi-SQ d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	57.931767	3	0.0000

Sumber : Olahan data melalui output E-Views 12

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, *Fixed Effect Model* (FEM) dianggap sebagai model yang paling tepat dan konsisten untuk digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil uji Chow dan uji Hausman tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam tahap analisis berikutnya adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa terpenuhinya model asumsi dasar regresi agar hasil estimasi dinyatakan valid. Pengujian yang dilakukan mencakup uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antarvariabel independen tidak melampaui batas toleransi 0,85. Nilai korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar $0,037423 < 0,85$, antara PAD dan Upah Minimum sebesar $0,817373 < 0,85$, serta antara PE dan UMK sebesar $-0,009960 < 0,85$. Dengan demikian, seluruh nilai korelasi antarvariabel independen masih berada di bawah batas yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas absolut residual (ABS Resid) terhadap masing-masing variabel independen yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Probabilitas masing-masing untuk variabel PAD sebesar 0,7720, variabel PE sebesar 0,2229, dan variabel UMK sebesar 0,0547. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ABS Residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Estimasi Regresi Data Panel

Tabel 3. Hasil Uji Regresi *Fixed Effect Model*

<i>Variable</i>	<i>Coef</i>	<i>Std.Error</i>	<i>t-Statistic.</i>	<i>Prob.</i>
C	128.0025	17.56389	7.287822	0.0000
PAD	-0.024667	0.008062	-3.059755	0.0027
PE	-0.300381	0.032708	-9.183621	0.0000
UMK	-3.465858	1.481526	-2.339385	0.0208
Effect Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.874485	Mean dependent var	8.123642
Adjusted R-squared	0.846910	S.D dependent var	2.407784
S.E of regression	0.942088	Akaike info	2.884140
Sum squared	117.1540	Schwarz criterion	3.455917
Log likelihood	-203.6154	Hannan-Quinn criter	3.116290
F-statistic	31.71262	Durbin-Watson stat	1.720091
Prob (F-statistic)	0.00000		

Sumber : Olahan data melalui output E-Views 12

$$TPT_{it} = 128.0025 - 0.024667 \ln PAD_{it} - 0.300381 PE_{it} - 3.465858 \ln UMK_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel *Fixed Effect Model*, seluruh variabel independen dalam model menunjukkan hubungan negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Nilai konstanta sebesar 128,0025 menunjukkan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Upah Minimum (UMK) bernilai nol, maka TPT diperkirakan sebesar 128,0025 persen. Namun demikian, nilai konstanta dalam model *Fixed Effect* tidak menjadi fokus utama interpretasi karena hanya berfungsi sebagai parameter penyesuaian model, sedangkan analisis difokuskan pada arah dan signifikansi koefisien variabel independen. Koefisien PAD bernilai negatif sebesar -0,024667 mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah cenderung menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, yang menunjukkan bahwa optimalisasi PAD berperan dalam mendorong belanja produktif dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,300381, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi menurunkan TPT melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sementara, UMK memiliki koefisien sebesar -3,465858 yang menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi daerah sehingga berdampak pada penurunan TPT.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 3, baik secara individual maupun bersama-sama, variabel independen terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan uji T, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai probabilitas $0,0027 < 0,05$ dengan nilai t-hitung -3,059755, yang secara absolut lebih besar dari t-tabel 1,975. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Selanjutnya, secara parsial pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ dengan nilai t-hitung -9,183621, yang secara absolut lebih besar dari t-tabel 1,975. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, upah minimum memiliki nilai probabilitas $0,0208 < 0,05$ dengan nilai t-hitung -2,339385, yang secara absolut lebih besar dari t-tabel 1,975, sehingga UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan agregat,

sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Secara simultan, pengujian menggunakan uji F menghasilkan nilai F-statistic sebesar 31,71262 yang lebih besar dibandingkan nilai F-tabel 2,661829 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum (UMK) secara bersama-sama terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,846910 mengindikasikan bahwa sebesar 84,69% variasi tingkat pengangguran mampu dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sebesar 15,31% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak tercakup dalam model penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengangguran

Hasil kajian mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada periode 2019 hingga 2024. Secara konseptual, temuan tersebut selaras dengan Teori Fiskal Daerah yang menjelaskan meningkatnya PAD akan memperbesar kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. PAD yang meningkat memperluas ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja publik produktif, seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi daerah, yang pada akhirnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran.

Secara empiris, kondisi Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa daerah dengan PAD relatif tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendukung pembangunan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja. Meskipun masih terdapat kabupaten/kota dengan PAD tinggi namun tingkat pengangguran relatif besar, hasil estimasi secara agregat menunjukkan bahwa peningkatan PAD tetap berkontribusi dalam menekan pengangguran selama periode penelitian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pangestu, Saleh, & Priyagus (2023) dan Irnando, Zulaikah, & Satriawan (2025) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pengangguran apabila dialokasikan secara efektif melalui belanja publik yang produktif. Namun, beberapa penelitian lain seperti Ali & Ningsih (2021) dan Kaji, Renggo, & Hudang (2024) menemukan bahwa peningkatan PAD belum tentu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran, karena pengaruhnya sangat bergantung pada efektivitas alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Temuan analisis mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2024. Temuan ini selaras dengan Hukum Okun yang menyatakan bahwa peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong kenaikan output dan aktivitas produksi, sehingga memperbesar kebutuhan tenaga kerja dan pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan meningkatnya kegiatan ekonomi yang berdampak langsung pada perluasan kesempatan kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Secara empiris, perekonomian Provinsi Jawa Barat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada meningkatnya pengangguran di hampir seluruh kabupaten/kota. Namun, pada periode pemulihan ekonomi tahun 2021-2024, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren peningkatan yang diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi masyarakat, serta pemulihan sektor industri dan jasa

mendorong penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Diniyah & Fisabilillah (2022), Alrahman, Susetyo, Taufiq, & Azwardi (2022), serta Moridian, Radulescu, Kumar, Radu, & Mohammad (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Namun, penelitian lain Rizki et al. (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh menurunkan pengangguran apabila pertumbuhan tersebut lebih banyak terjadi di sektor padat modal dibandingkan padat karya.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Hasil analisis mengindikasikan bahwa upah minimum memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2019-2024. Penelitian ini selaras dengan pandangan teori Keynesian yang menekankan bahwa upah tidak semata-mata berfungsi sebagai komponen biaya produksi, tetapi juga merupakan sumber pendapatan utama masyarakat yang berperan penting dalam menentukan tingkat konsumsi. Peningkatan upah minimum meningkatkan daya beli rumah tangga, sehingga mendorong permintaan agregat dan memperluas aktivitas produksi. Hal ini pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan pengangguran.

Secara empiris, penyesuaian upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode penelitian tidak diikuti oleh peningkatan pengangguran, khususnya pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum relatif masih berada pada tingkat yang dapat diakomodasi oleh dunia usaha, serta didukung oleh perbaikan aktivitas ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizki, Daeng, & Singandaru (2025), Tangke (2023) dan Ramos-Herrera (2023) yang menyatakan bahwa upah minimum dapat berpengaruh negatif terhadap pengangguran apabila disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha dan didukung oleh peningkatan produktivitas serta permintaan agregat. Namun penelitian Tkacova, Gavurova, & Gontkovicova (2024) menunjukkan bahwa upah tidak berpengaruh terhadap pengangguran, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi dan kondisi pasar tenaga kerja antar wilayah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Temuan studi mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat kurun waktu 2019-2024. Temuan ini sejalan dengan pendekatan Keynesian yang menekankan bahwa kondisi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan fiskal, dinamika pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendapatan masyarakat. PAD merepresentasikan kapasitas fiskal daerah dalam mendanai pembangunan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas produksi dan permintaan tenaga kerja, sementara upah minimum berperan dalam mendorong daya beli dan permintaan agregat.

Secara empiris, dinamika pengangguran di Provinsi Jawa Barat kurun waktu penelitian menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja. Pada masa pandemi Covid-19, kontraksi ekonomi menyebabkan peningkatan pengangguran meskipun kebijakan fiskal dan upah minimum tetap berjalan. Namun, pada periode pemulihan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan stabilitas kebijakan upah minimum serta kapasitas fiskal daerah berkontribusi terhadap penurunan pengangguran di sebagian besar kabupaten/kota. Temuan penelitian ini selaras dengan hasil riset Yeimo & Ayuningsasi (2022) serta Rizki, Daeng, & Singandaru (2025) yang menyatakan bahwa

pengangguran di tingkat daerah dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dirumuskan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2019-2024 dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan upah minimum. Secara parsial, temuan penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Temuan ini merefleksikan teori fiskal daerah yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah memperluas ruang pembiayaan pembangunan, terutama melalui belanja produktif di sektor pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi daerah yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan pengaruh negatif yang signifikan dengan tingkat pengangguran, sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Okun yang menegaskan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang berlawanan. Meningkatnya aktivitas perekonomian daerah mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja serta memperluas peluang kerja, baik pada sektor formal maupun informal. Sementara itu, upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, yang mendukung pandangan Keynesian bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat permintaan agregat, dan mendorong penyerapan tenaga kerja.

Secara bersama-sama, PAD, pertumbuhan ekonomi, dan UMK berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran di tingkat daerah tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara kapasitas fiskal daerah, kinerja ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penanganan pengangguran memerlukan kebijakan ekonomi daerah yang terintegrasi dan saling mendukung. Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan PAD dengan mengarahkan belanja pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, seperti sektor pendidikan dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu terus diperkuat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan peningkatan iklim investasi, seperti sektor industri pengolahan dan jasa. Pemerintah juga diharapkan menetapkan kebijakan upah minimum secara proporsional dengan mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha agar tetap mendukung penciptaan kesempatan kerja. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, struktur sektor ekonomi, atau investasi, serta memperpanjang periode pengamatan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengangguran di tingkat daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Akalbeo, B., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2022). Fiscal Decentralization and Structural versus Cyclical Unemployment Levels. *International Center for Public Policy*.
- Ali, K., & Ningsih, N. W. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(1), 85–101. 10.24127/jm.v15i1.585
- Alрахman, D., Susetyo, D., Taufiq, & Azwardi. (2022). Effect of Economic Growth on Unemployment Rate in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-*

- Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 10132–10141. 10.33258/birci.v5i2.4811
- Diniyah, H., & Fisabilillah, L. W. P. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 155–168. 10.26740/independent.v2i2.50992
- Fatmawati, L., Rosidin, A., & Al-Ra'zie, Z. H. (2025). Mengembangkan Teori Keynesian untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 206–216. 10.62383/presidensial.v2i2.757
- Irnando, A., Zulaikah, & Satriawan, D. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Data Panel Pada Tahun 2015-2024). *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 13(1). 10.35450/jip.v13i01.966
- Kaji, D. R. L. A., Renggo, Y. R., & Hudang, A. K. (2024). Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pengangguran di Pulau Sumba. *Jurnal Interprof*, 10(2), 1–11. 10.32767/interprof.v10i2.2289
- Keynes, B. H. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money* (Vol. 51). Retrieved from <https://academic.oup.com/psq/article/51/4/600/7149051>
- Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87–91. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.490>
- Moridian, A., Radulescu, M., Kumar, P., Radu, M. T., & Mohammad, J. (2024). New insights on immigration, fiscal policy and unemployment rate in EU countries – A quantile regression approach. *Heliyon*, 10(13), e33519. 10.1016/j.heliyon.2024.e33519
- Oyvatt, C., Öztunalı, O., & Elgin, C. (2020). Wage-led versus profit-led demand: A comprehensive empirical analysis. *Metroeconomica*, 71(3), 458–486. 10.1111/meca.12284
- Pangestu, P. P., Saleh, M., & Priyagus, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Kalimantan Timur. *Edunomics Journal*, 4(1), 1–10. 10.37304/ej.v4i1.7944
- Parulian, F. E. D., Simbolon, R. L., Wulandari, Y. N., & Budiasih, B. (2025). Pembuktian Empiris Okun's Law dalam Permasalahan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle). *Ekono Insentif*, 19(1), 37–48. 10.36787/jei.v19i1.1612
- Rafli, M. R., Nurhafiyansa, N., Syafa, M. K., & Aisyah, L. (2024). Okun's Law: Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar Ditinjau dari Perspektif Laju Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 5(1), 12–21. 10.47747/jbme.v5i1.1595
- Ramos-Herrera, M. D. C. (2023). The effects of minimum wage on unemployment for OECD countries: A dynamic fixed effects panel threshold model perspective. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(3), 2217880. 10.1080/1331677X.2023.2217880
- Rizki, D. M., Daeng, A., & Singandaru, A. B. (2025). Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 56–63.
- Tangke, D. M. (2023). Analisis Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Faktor Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi-Qu*,

-
- 13(1), 31. 10.35448/jequ.v13i1.20529
- Tkacova, A., Gavurova, B., & Gontkovicova, B. (2024). The impact of minimum wage increases on unemployment in the V4 countries: Assessing the recommendations of the European Commission. *Journal of International Studies*, 17(3), 51–67. 10.14254/2071-8330.2024/17-3/3
- Wijayanto, H., & Ode, S. (2019). *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia*. 10. 10.23960/administratio.v10i1.82
- Yeimo, J. E. F., & Ayuningsasi, A. A. K. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Regional, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Kawasan Non-Sarbargita Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1307. 10.24843/eeb.2022.v11.i11.p02
- Yusuf, M. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Luwu Timur. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 5(2), 36–48. 10.24256/dalrev.v5i2.6472